

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM FUNGSIONALISASI  
BENDUNGAN DANAU KEBUN NOPI KECAMATAN KUANTAN MUDIK  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012-2018**

**Oleh: Dwi Rafni Devitasari**

Email: dwirafni96@gmail.com

Dosen pembimbing: **Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Dam functionalization can be interpreted as an effort to establish so that the dam can function, operate or work as it should. The change in function can be in the form of improvements in the economic, tourism, socio-cultural and environmental sectors. Formulation of the problem from this study (1) What are the Efforts of Local Government in the Functionalization of Lake Kebun Nopi Dam, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi District 2012-2018? (2) What are the obstacles of the Regional Government in the Functionalization of Lake Kebun Nopi Dam, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency in 2012-2018?*

*This study aims to (1) Explore the efforts made by the Kuantan Singingi District Government in the Functionalization of Lake Kebun Nopi Dam in 2012-2018, (2) Knowing the obstacles of the Kuantan Singingi District Government in the Functionalization of Lake Kebun Nopi Dam in 2012-2018. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research was conducted in Kuantan Singingi Regency. Data collection techniques carried out by interview, literature study and documentation.*

*The results of the study concluded that the efforts of the Regional Government in the Functionalization of Lake Kebun Nopi Dam include the stockpiling of the dam collapsed with sacks filled with cement, building irrigation networks, forming tourism awareness groups, entrepreneurship training, and sending a letter of request to the Ministry of Public Works regarding funding assistance for Lake Dam functionalization. Nopi Gardens. Dam function effort is affected by budget limitations and lack of coordination between the Regional Government and the Central Government.*

**Keywords: *Functions of Development, Planning, Coordination***

## PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan, bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa ukuran tanah, ukuran batu, beton dan atau pasangan batu yang dibangun untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

Selain digunakan sebagai wadah penampungan air, bendungan juga dapat menahan dan mengontrol laju keluarnya air dari danau, sungai, rawa, laut dan sebagainya. Dengan adanya tampungan dari bendungan ini diharapkan kelebihan air dimusim hujan dapat disimpan untuk digunakan pada musim kemarau yang mempunyai tingkat kebutuhan air relatif tinggi.

Meskipun memiliki nilai manfaat yang besar, pembangunan bendungan menyimpan berbagai potensi permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah bendungan ambruk. Permasalahan ambruknya bendungan merupakan salah satu masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana bendungan yang terdapat di Desa Bukit Pedusunan ini ambruk sejak tahun 2012 yang lalu. Ambruknya bendungan Danau Kebun Nopi ini terjadi disebabkan oleh daya tampung air danau tidak seimbang dengan ketersediaan bangunan bendungan. Danau yang awalnya digunakan sebagai sarana untuk mengairi persawahan masyarakat kemudian diperbesar dan digunakan sebagai *venue* dayung PON tahun 2012. Kemudian ambruknya bendungan tersebut menyebabkan

sulitnya masyarakat setempat menyebrangi danau, karena jalan di atas dam bendungan merupakan akses menuju perkebunan karet yang berada di seberang danau tersebut.

Sejak usai diselenggarakannya PON di Riau tahun 2012 yang lalu, air bekas Venue Dayung tersebut semakin surut, tak hanya itu saja, rumput yang berada ditengah-tengah danau terlihat jelas pertanda air yang ada didalam danau tersebut semakin dangkal. Karenanya 251 Hektar lahan persawahan di Kecamatan Kuantan Mudik terkena dampak akibat tidak bisa difungsikannya bendungan Danau Kebun Nopi untuk mengairi persawahan. Adapun desa yang terkena dampak dari ambruknya bendungan adalah Desa Bukit Pedusunan, Desa Luai, Desa Seberang Pantai dan Desa Pulau Binjai.

Kerugian yang dialami bukan hanya pada sektor pertanian namun juga pada sektor perikanan dan pariwisata. Yang mana dahulunya di Desa Bukit Pedusunan masyarakat setempat memanfaatkan air danau tersebut untuk budidaya ikan dengan kolam apung (*keramba*), dan juga dimanfaatkan sebagai wisata tirta (*air*) yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Bukit Pedusunan. Kerugian selanjutnya adalah sulitnya masyarakat disekitar sungai Luai yang memanfaatkan aliran air danau tersebut untuk mandi.

Melihat Permasalahan ambruknya bendungan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi. Fungsionalisasi berasal dari kata fungsi yang artinya berguna. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Fungsionalisasi adalah menjadikan suatu hal berfungsi.

Fungsionalisasi juga berarti pemfungsionalan, mengembalikan sesuatu yang awalnya tidak memiliki fungsi hingga menjadikannya berfungsi seperti sebagaimana mestinya.

Menurut Robert Merton, fungsi merupakan konsekuensi dasar yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan. Berdasarkan pendapat tersebut fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsi. Pada hakekatnya adalah memfungsikan kembali suatu tempat atau organisasi mencakup perubahan substansial pada organisasi, tetapi masih selaras dengan struktur, sistem dan proses yang telah ada pada organisasi tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Sebagai pelayanan publik yang mendasa, berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan pembangunan telah menjadi urusan pilihan Pemerintah Daerah. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomikan sekalipun kepada daerah.

Sesuai dengan asas pembantuan (*medebewind*) dalam menjalankan pembantuan tersebut urusan pusat/daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan daerah yang dimintai bantuan. Namun, cara daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan sepenuhnya ke daerah itu sendiri. Daerah otonom tidak berada dibawah perintah, dan juga tidak dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih tinggi yang memberikan tugas. Karena hakekatnya urusan yang diperbantukan pada daerah ototnom tersebut adalah urusan pusat maka dalam sistem *medebewind* anggarannya berasal dari APBN. Anggaran pusat ini lalu ditransfer langsung ke kas daerah. Anggaran ini masuk kerekening khusus yang pertanggungjawabannya terpisah dari APBD.

Peran Pemerintah Daerah dalam upaya Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Upaya fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi merupakan urusan pemerintah konkuren (pilihan), yang mana kewenangan pemerintahannya dibidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian serta transmigrasi. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Peran pemerintah merupakan suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat berdasarkan atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan fungsionalisasi bendungan. Menurut Syam (2012:176) peran serta pemerintah diartikan sebagai bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari suatu pihak ke pihak lain.<sup>1</sup> Kemudian dalam perumusan kebijakan fungsionalisasi bendungan Danau Kebun Nopi harus dioptimalkan, karena bendungan

memiliki peran penting dalam pembangunan, diantaranya bagi sektor pertanian, perikanan, PLTU, pariwisata dan lingkungan hidup.

Dilakukannya fungsionalisasi ini, diharapkan dapat mengembalikan fungsi bendungan seperti sebelumnya. Adapun pendanaan awal dalam perbaikan bendungan menggunakan dana APBD, namun dana tersebut tidak sesuai dengan kerusakan bendungan yang diperlukan pers gbaikan total dan menggati bangunan lama dengan bangunan yang baru. Pada awal tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah menganggarkan dana sebesar 1,3 miliar yang di kucurkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat. Yang mana dana tersebut akan digunakan untuk membangun saluran irigasi dan perbaikan bendungan, selanjutnya akan dibangun jalan usaha tani dan pembukaan jalan baru.

Pembangunan jaringan irigasi dilakukan dari bendungan danau Kebun Nopi Bukit Pedusunan menuju arah Desa Pulau Binjai sepanjang 670 meter, untuk mengairi areal persawahan yang berada di hamparan Luai yang meliputi desa Bukit Pedusunan, Luai, Seberang Pantai, Rantau Sialang dan Pulau Binjai di Kecamatan Kuantan Mudik. Sementara sumber airnya tetap berasal dari bendungan venue dayung tersebut. Namun perbaikan Bendungan Danau Kebun Nopi Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik yang direncanakan batal dilaksanakan, pasalnya Pemerintah Pusat tidak bersedia menganggarkan dana untuk revitalisasi bendungan tersebut.

Selanjutnya Pemerintah Daerah melaporkan hal tersebut ke

---

<sup>1</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat

Kementerian PU Jakarta dan Balai Besar Sumatra III. Pada tahun 2017-2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kembali menyurati Pemerintah Pusat, yang mana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kembali berencana untuk melakukan rehab total dikarenakan bangunan bendungan yang usianya sangat tua tidak memadai untuk menampung genangan air danau yang semakin luas. Maka dengan keterbatasan anggaran yang ada, diharapkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang menyebabkan belum adanya dana anggaran untuk Refungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi tersebut.
2. tampung air danau tidak seimbang dengan ketersediaan bangunan bendungan, luas danau yang awalnya 35 hektar dan sejak dijadikan venue dayung luasnya sudah mencapai 70 hektar dengan genangan kurang lebih 100 hektar.
3. Ambruknya Bendungan Danau Kebun Nopi menyebabkan volume genangan air yang ada di dalam danau semakin dangkal, akibatnya 251 hektar persawahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik terkena dampak karena tidak adanya persediaan air untuk mengairi persawahan. 251 hektar persawahan tersebut terdapat di 4 Desa di Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu: Desa Bukit

Pedusunan, Desa Sebrang Pantai, Desa Pulau Binjai dan Desa Luai.

Berkaitan dengan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2018.”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Apa Upaya Pemerintah Daerah dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2018?
2. Apa faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2018?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam *Fungsionalisasi* Bendungan Danau Kebun Nopi Tahun 2012-2018.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Tahun 2012-2018

## Kerangka Teori

### a. Pembangunan

Pada hakekamanya pembangunan adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan. Dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*). Tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat. Pengertian pembangunan sendiri seperti yang diungkapkan oleh Fortes (1976) mendefinisikan pembangunan (*development*) sebagai *transformed economy, social and culture*.<sup>2</sup> Pembangunan nasional adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperoleh berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan melalui kebijakan, strategi dan rencana.

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya di bidang ekonomi, bahkan dalam beberapa asumsi yang sangat lama pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi 'sebagian orang tersingkir dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi' pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya. Lebih lanjut dalam buku *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* oleh Budiman dijelaskan bahwa beberapa faktor dalam mengukur pembangunan ialah kekayaan rata-rata yang menjelaskan bahwa sebuah masyarakat dinilai berhasil melakukan pembangunannya

bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.<sup>3</sup>

Menurut Nugroho dan Rokhim Dahuri, pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.<sup>4</sup> Dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Secara umum dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai suatu proses kesejahteraan bagi masyarakat. Pengertian Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera.

Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan dan mengecilnya tinggaknya pengangguran. Sedangkan menurut Ginjar Kartasmita, pembangunan merupakan suatu proses perubahan kerah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara berencana.

Menurut Deddy T. Tikson pembangunan adalah upaya pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang

2 Adon Nasrulloh Jamaludin. *Sosiologi Pembangunan*, (Kota Surakarta: Pustaka Setia)

3 Dr. Budiman Arif, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)

4 Iwan Nugroho dan Rokhim Dahuri, *Pembangunan Wilayah: perspektif ekonomi sosial dan lingkungan*. (Yogyakarta: LP3ES, 2012)

diinginkan.<sup>5</sup> Deddy T. Tikson menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

Pembangunan juga mempunyai beberapa faktor penghambat, Menurut Tjokroamidjojo dalam Nawawi, 2009 faktor yang mempengaruhi pembangunan dan mempunyai relevansi dengan kondisi masyarakat antara lain:

1. Masyarakat yang masih tradisional,
2. Masyarakat yang bersifat peralihan, dan
3. Masyarakat maju (modern).

Sedangkan menurut Didin S. Damanhuri, 2010 berdasarkan problema empiris ekonomi politik dan pembangunan di negara-negara sedang berkembang, faktor-faktor yang menjadi tantangan, masalah dan hambatan dalam pembangunan yaitu:

1. Globalisasi,
2. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan,
3. Industrialisasi, pertanian dan informalisasi ekonomi,
4. Korupsi, kebocoran, dan inefisiensi,
5. Utang luar negeri,
6. Lingkungan (ekologi), dan
7. Birokrasi.

#### **b. Pemerintah**

Pemerintah merupakan organisasi yang berwenang untuk

merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayah. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan lainnya.<sup>6</sup>

Pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah dibentuk untuk melayani atau sebagai pelayan masyarakat atau istilah yang lebih gagah adalah abdi negara.<sup>7</sup> Keberadaan pemerintah di semua negara tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. Menurut Ryaas Rasyid (1998:3), secara umum ada 2 tujuan pembentukan pemerintah suatu negara, yaitu:

1. Menegakkan keteraturan  
Pemerintah dibentuk agar tercipta rasa aman dikalangan masyarakat suatu negara. Sebelum negara terbentuk, keadaan masyarakat sungguh kacau atau tidak teratur. Masing-masing membuat aturan sendiri-sendiri sehingga timbul ketidak-amanan, misalnya perampokan, dan pemerkosaan.
2. Menciptakan suasana yang adil  
Pemerintah dibentuk dengan harapan bahwa anggota masyarakatnya dapat difasilitasi untuk memperoleh peluang yang sama (adil) dalam berbagai segi kehidupan, misalnya dalam bidang politik, hukum dan ekonomi.<sup>8</sup>

Selain itu Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa pemerintah itu mempunyai 3 (tiga) fungsi yang hakiki, yaitu:

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.53

<sup>7</sup> Prof. DR. H. Zaidan Nawawi, M.Si, *Manajemen Pemerintahan* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015. Hlm.25

<sup>8</sup> Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan di Indonesia*. (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia. 2016). Hlm.14-15

<sup>5</sup> Deddy T. Tikson, *Administrasi Pembangunan*. (Makassar: Gemilang Persada, 2005)

1. Fungsi pelayanan (*service*) yang akan memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingannya;
2. Fungsi pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian; dan
3. Fungsi pembangunan (*development*) yang akan menciptakan masyarakat agar memiliki kemakmuran.

Menurut Ndaraha Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

1. Fungsi primer, yaitu pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*Powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.<sup>9</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah mempunyai 3 fungsi, yaitu:

1. Fungsi pengaturan, yakni mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan teratur;
2. Fungsi pelayanan, yakni melayani berbagai kepentingan umum masyarakat. Fungsi ini secara kongkret ditujukan antara lain adanya kewajiban/kewenangan menjalankan pelayanan dibidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan bidang-bidang kesejahteraan masyarakat lainnya; dan

3. Fungsi pembangunan, yakni membangun kehidupan masyarakat diberbagai bidang (sarana/prasarana perekonomian, kebudayaan, pemerintahan dll) agar masyarakat berdaya dan makmur

Menurut Seowargono dan Djohan menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat suatu kebijakan.<sup>10</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Upaya Pemerintah Daerah dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2018

1. Pada Tahun 2013

Pada awal tahun 2013, merupakan awal dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam rehabilitasi Bendungan Danau Kebun Nopi. Dalam upaya fungsionalisasi bendungan Pemerintah Daerah melalui Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya melakukan penimbunan bagian bendungan yang ambruk dengan karung yang berisikan semen. Hal ini dilakukan karena minimnya APBD jika dibandingkan dengan kerusakan yang dialami bendungan. Selain itu Pemerintah Daerah telah surat permohonan kepada kementerian PU namun tidak direspon.

Lain halnya dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata belum terlibat langsung dalam upaya Fungsionalisasi Bendungan Danau

<sup>9</sup> Dr. Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011. Hal 32

<sup>10</sup> ibid

Kebun Nopi dikarenakan tidak adanya koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun Dinas Pariwisata sudah melakukan pelatihan dan membentuk kelompok sadar wisata bagi masyarakat sekitar bendungan khususnya Desa Bukit Pedusunan.

Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Upaya	Penjelasan
1.	Membentuk kelompok sadar wisata pengelolaan mandiri	Kelompok Sadar wisata Desa Bukit Pedusunan menjadikan danau kebun nopi sebagai wisata tirta (air). Yang mana melalui APBD Dinas Pariwisata memberikan bantuan seperti sepeda air bebek yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik.
2.	Pelatihan kewirausahaan	Kegiatan ini dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM dalam pembuatan produk makanan, pemberdayaan pelaku usaha, pelatihan pengemasan makanan serta pelatihan mengolah makanan

Sumber: Hasil olahan peneliti 2019

## 2. Pada Tahun 2014-2015

Minimnya APBD membuat Pemerintah Daerah kembali mengirimkan surat permohonan kepada kementerian PU perihal bantuan dana anggaran untuk refungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi. Namun, sampai saat ini belum ada respon dari kementerian PU tersebut.

## 3. Pada Tahun 2016

Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah membangun jaringan irigasi di sekitar persawahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik.

Kegiatan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	Urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah/program/kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu indikatif	Sumber dana
2016	Pembangunan jaringan irigasi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang optimal	Kab. Kuantan Singingi	100%	600.000.000,00	APBD

Sumber: Dokumen Renja Dinas PUPR tahun 2016

Berdasarkan penjelasan dan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membangun jaringan irigasi guna membantu petani dalam bercocok tanam. Adapun dana anggaran yang digunakan untuk Pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Kuantan Mudik pada Tahun 2016 sebanyak Rp 600.000.000,00, yang

mana dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun pembangunan jaringan irigasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak membantu petani, dikarenakan terjadi kesalahan dalam pembangunan jaringan irigasi yang menyebabkan lebih tinggi ladang (persawahan) dibandingkan jaringan irigasi.

## 4. Pada Tahun 2017-2018

Pada tahun 2017-2018, minimnya Dana APBD membuat Pemerintah Daerah tetap mengirim surat permohonan kepada Kementerian PU perihal bantuan dana untuk refungsionalisasi bendungan Danau Kebun Nopi dikarenakan masih banyaknya kebutuhan yang diperlukan, baik bangunan fisik maupun non fisik untuk fungsionalisasi bendungan tersebut.

Pemerintah Daerah sudah berkali-kali mengirim surat permohonan kepada Kementerian PU namun sampai saat ini belum mendapatkan respon. Pemerintah Daerah sangat berharap bantuan dari Pusat guna persiapan *Porprov* tahun 2020 yang mana Kuansing diusulkan sebagai tuan rumah.

Setiap dinas yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari kebijakan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan berbagai kebijakan dalam Fungsionalisasi Bendungan danau Kebun Nopi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi adalah dengan membuat Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi dimana menurut visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang secara terperinci. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

Pembangunan di sektor ke-PU-an dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan infrastruktur, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaa pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang

- pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
  - k.

### **3.2 Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2018**

Setiap dinas yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki program-program sendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari program-program tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, dalam upaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Presiden maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan berbagi program-program guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu program tersebut adalah Rehabilitasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik.

Adapun hambatan-hambatan berkaitan Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi

Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2018 adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1 Keterbatasan Anggaran**

Anggaran dana merupakan salah satu penghambat fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Tahun 2012-2018. Hambatan keterbatasan anggaran ini merupakan hal yang paling utama dari setiap kegiatan. Karena setiap kegiatan memerlukan dan membutuhkan anggaran untuk kelancaran kegiatan tersebut. Apalagi dalam sebuah pembangunan hal yang paling utama adalah anggaran.

Pemerintah telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk terselenggaranya fungsionalisasi bendungan namun minimnya anggaran membuat kegiatan tersebut tidak terlaksana. Surat yang dikirim ke Kementerian PU hingga saat ini belum mendapat respon. Pemerintah Daerah membutuhkan dana sebesar 62 Miliar untuk pembangunan Bendungan yang baru. Adapun APBD nantinya akan di fokuskan untuk perbaikan jaringan irigasi.

#### **3.2.2 Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi**

Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk Refungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi dapat dilihat dari tidak adanya respon dari Pemerintah Pusat perihal surat permohonan bantuan dana untuk Refungsionalisasi bendungan tersebut.

Dapat disimpulkan hambatan yang di alami oleh Pemerintah

daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi bukan hanya dari segi anggaran melainkan kurangnya koordinasi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

## PENUTUP

### 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

Upaya Pemerintah Daerah dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2018 masih belum optimal. Yang mana Upaya Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2012-2018. Kemudian, tidak memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang mengalami kerugian, baik kerugian dari bidang pertanian, bidang perikanan, bidang pariwisata serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat.

Adapun Faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemerintah Daerah dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2018 yaitu:

1. Keterbatasan anggaran, minimnya APBD menyebabkan program fungsionalisasi bendungan tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan;
2. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk Refungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi, hal ini dapat dilihat dari belum adanya respon yang diberikan Pemerintah

Pusat perihal perbaikan Bendungan Danau Kebun Nopi.

### 2 Saran

Dalam penelitian Upaya Pemerintah Daerah dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2012-2018, setelah dilakukan beberapa analisis, maka peneliti memberikan saran agar Pemerintah Daerah mempunyai strategi dan regulasi sendiri dalam Fungsionalisasi Bendungan Danau Kebun Nopi dan dapat menjalankan program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kedepannya, karena bendungan Danau Kebun Nopi merupakan satu-satunya sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik baik di bidang pertanian, perikanan, pariwisata serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ahmadi, Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sufianto, Dadang. (2016). *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Eidosa

- Burhan Bungin. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. (2006). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Soekanto Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Labolo Muhadam. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nawawi Zaidan, (2015). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Usman Husaini, (2011). *Metode Penelitian Sosial, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nasrulloh Jamaludin Ado, (2016). *Sosiologi Pembangunan*, Kota Surakarta: Pustaka Setia
- Tikson T. Deddy, (2005) *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada
- Jurnal dan Skripsi:**
- Nur Ema Purnama, dkk. (2018). *Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*
- Suryadi Hery, dkk. (2013). *Kebijakan Revitalisasi Pasar Bawah Sebagai Kawasan Wisata Cagar Budaya di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Fisip UR
- Asep Syahri Romadhann TZ, 2016. *Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2007-2016*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Desi Hardianti, 2018. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan kepariwisataan Festival Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- M. Viqy Saputra Misya, 2016. *Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendidikan di Komunitas Adat terpencil desa Sesap Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2014*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Gita HardiWirasukma, 2019. *Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan destinasi pariwisata unggulan Tahun 2017-2018..* Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- M. Iqbal Setiawan, 2018. *Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2016*. Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Undang-Undang:**  
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 27 Tahun 2016

tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas  
dan Fungsi serta Tata Kerja  
Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten  
Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten  
Kuantan Singingi No 4 Tahun  
2016 tentang Pembentukan  
dan Susunan Perangkat  
Daerah Kabupaten Kuantan  
Singingi

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  
Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten  
Kuantan Singingi tahun 2016

Undang-undang No 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 37  
Tahun 2010 tentang  
bendungan

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun  
2015 tentang Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat dan  
Peraturan Presiden Nomor  
135 Tahun 2018 tentang  
perubahan atas Peraturan  
Presiden Nomor 15 tahun  
2015 tentang Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat.